

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KORUPSI DI
INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*



OLEH:

MUHAMMAD FAUZIE

2018 / 18060042

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KORUPSI DI INDONESIA

Nama : Muhammad Fauzie
NIM/TM : 18060042/2018
Departemen : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, April 2025

Diketahui Oleh :
Kepala Departemen Ilmu Ekonomi,

Disetujui dan Disahkan Oleh :
Pembimbing,



Dr. Novya Zulva Riani, SE, M.Si
NIP. 19711104 200501 2 001



Dr. Novya Zulva Riani, SE, M.Si
NIP. 19711104 200501 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi

Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

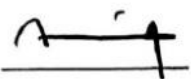
Universitas Negeri Padang

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KORUPSI DI INDONESIA

Nama : Muhammad Fauzie
NIM/TM : 18060042/2018
Departemen : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, April 2025

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Dr. Novya Zulva Riani, SE, M.Si	1. 
2	Anggota	Dr. Muhammad Irfan, SE, MSi	2. 
3	Anggota	Maizul Rahmizal, SE, M.Sc	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Muhammad Fauzie
NIM/TM : 18060042/2018
Tempat/Tanggal Lahir: Bukittinggi/ 17 Juni 2000
Departemen : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jorong Kaluang Tapi, Koto Tengah, Tilatang Kamang, Agam
No. HP/Telepon : 08985821157
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Di Indonesia

Dengan Ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), Baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasi kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji, dan Ketua Jurusan

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 2025

Yang Menyatakan,



Muhammad Fauzie

NIM. 18060131

ABSTRAK

MUHAMMAD FAUZIE (18060042): Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi di Indonesia, Skripsi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Dibawah bimbingan Ibuk Dr. Novya Zulfa Riani, S.E, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis; (1) untuk mengetahui hubungan demokrasi dengan korupsi di Indonesia, (2) untuk mengetahui hubungan indeks pembangunan manusia dengan korupsi di Indonesia, (3) Untuk mengetahui hubungan tata kelola pemerintahan dengan korupsi di Indonesia.

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder tahunan *time series* dari tahun 2009-2023 yang diperoleh dari situs resmi. Penelitian ini menggunakan model analisis korelasi pearson untuk mengetahui bagaimana hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) demokrasi berkorelasi positif dan signifikan dengan tingkat keeratan hubungan kategori kuat terhadap korupsi di Indonesia, (2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkorelasi positif dan signifikan dengan tingkat keeratan hubungan kategori cukup terhadap korupsi di Indonesia, (3) tata kelola pemerintahan berkorelasi positif dan signifikan dengan tingkat keeratan hubungan kategori kuat terhadap korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi, Indonesia, Demokrasi, Tata kelola pemerintahan.

ABSTRACT

MUHAMMAD FAUZIE (18060042): Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi di Indonesia, Skripsi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Dibawah bimbingan Ibuk Dr. Novya Zulfa Riani, S.E, M.Si

This study aims to identify and analyze: (1) the relationship between democracy and corruption in Indonesia, (2) the relationship between the human development index and corruption in Indonesia, and (3) the relationship between governance and corruption in Indonesia.

This research is descriptive in nature using a quantitative approach. The data used are annual secondary time-series data from 2009–2023 obtained from official websites. This study employs the Pearson correlation analysis model to determine the relationship between the independent variables and the dependent variable.

The results of this study indicate that: (1) democracy has a positive and significant correlation with a strong level of relationship to corruption in Indonesia; (2) the Human Development Index (HDI) has a positive and significant correlation with a moderate level of relationship to corruption in Indonesia; (3) governance has a positive and significant correlation with a strong level of relationship to corruption in Indonesia.

Keyword: Corruption, Indonesia, Democracy, Governance.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajarannya kepada umatnya. Atas izin dan kehendak Allah SWT penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Ketidakpastian Inflasi dan Ketidakpastian Ekonomi terhadap Permintaan Uang di Indonesia”. Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini atas izin Allah SWT sebagai pemegang kendali. Penulis juga sadar bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi, semua ini tidak terlepas dari do’a dan dukungan segenap keluarga besar yang selalu percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas dan tulus akan membuahkan hasil yang maksimal. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa dan terhormat kepada kedua orang tua saya dan saudara saya yang selalu mendoakan, memotivasi, menasehati, memberikan semangat, dukungan baik moril maupun materil kepada penulis demi keberhasilan dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi.
2. Bapak Prof. Prengki Susanto, S.E, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang beserta Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

3. Ibu Dr. Novya Zulva Riani, S.E, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Dr. Novya Zulva Riani, S.E, M.Si selaku pembimbing skripsi, yang telah bersedia mengorbankan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Irfan, S.E, M.S.E dan bapak Maizul Rahmizal S.E, M.Sc selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
7. Kak Asma Lidya, AMd selaku admin Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang telah membantu penulis dalam hal pengurusan administrasi.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan dengan saya yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberi semangat kepada penulis.

Dalam tulisan ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca terhadap skripsi ini agar dapat menjadi karya yang bernilai dan bermanfaat.

DAFTAR ISI

ABSTRACT	6
KATA PENGANTAR.....	7
DAFTAR ISI.....	9
DAFTAR TABEL	10
DAFTAR GAMBAR.....	11
BAB I PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang.....	12
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Landasan Teori	20
B. Penelitian Terdahulu.....	42
C. Kerangka Konseptual	46
D. Hipotesis	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Tempat Penelitian	48
C. Jenis dan Sumber Data	48
D. Definisi Operasional Variabel.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	56
B. Analisis Deskriptif.....	56
C. Analisis Induktif.....	65
D. Pembahasan.....	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77

DAFTAR TABEL

TABEL 1. PENELITIAN TERDAHULU	42
TABEL 2. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL	49
TABEL 3. TINGKAT KORELASI DAN KEKUATAN HUBUNGAN	54
TABEL 4. DATA INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) DI INDONESIA TAHUN 2009-20023	57
TABEL 5. DATA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) TAHUN 2009-2023.....	59
TABEL 6. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI INDONESIA TAHUN 2009-2023	61
TABEL 7. DATA POLITICAL STABILITY AND ABSANCE OF VIOLENCE/TERRORISM DI INDONESIA TAHUN 2009-2023	64

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. KORUPSI DI INDONESIA TAHUN 2019-2023	14
GAMBAR 2. KERANGKA KONSEPTUAL	46
GAMBAR 3. UJI KORELASI	66
GAMBAR 4. HASIL UJI NORMALITAS	68
GAMBAR 5. UJI LINEARITAS	69

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan suatu tindakan menyimpang yang dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, sepanjang insentif yang dihasilkan cukup besar. Penyakit korupsi ini bisa terjadi di sektor publik maupun swasta, bahkan di tingkat masyarakat. Fenomena korupsi merupakan masalah besar yang dihadapi berbagai negara di dunia. Masalah korupsi tidak hanya dihadapi oleh negara yang sedang berkembang, namun juga di beberapa negara-negara maju sekalipun (Hariyani et al., 2016).

Korupsi berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, korupsi sudah menjadi bagian hidup kita, praktek korupsi yang terjadi secara terus-menerus dan tidak mendapatkan sanksi menciptakan toleransi terhadap praktek korupsi. Korupsi adalah tindakan yang dibenci dan dimusuhi oleh seluruh rakyat dimanapun. Korupsi dapat menyebabkan rendahnya tingkat investasi, korupsi disertai dengan birokrasi yang lambat dan tidak efisien yang menyebabkan investor menjadi enggan berinvestasi karena proses perizinan yang tidak jelas, memakan waktu dan memerlukan biaya tambahan (Mauro, 1995). Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi dapat merusak alokasi sumber daya publik karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru disalahgunakan (Farooq et al., 2013). Korupsi juga menyebabkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, korupsi menyebabkan dana publik dialihkan dari sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan ke proyek yang lebih rentan terhadap

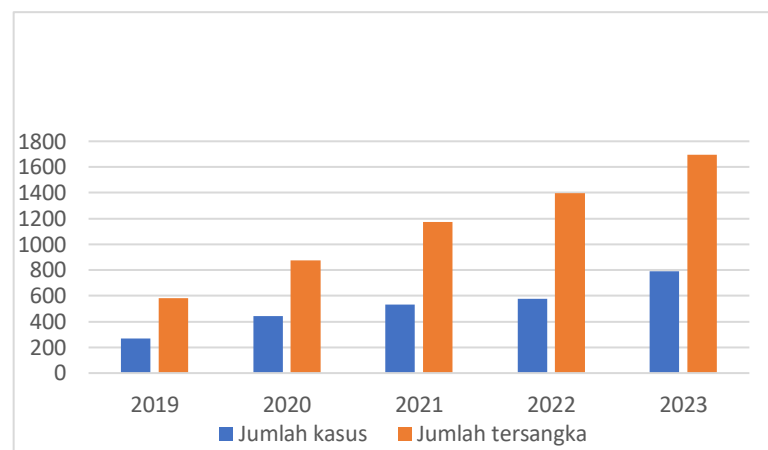
penyalahgunaan, sehingga mengurangi akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar (Gupta et al., 1998).

Di Indonesia praktik-praktik seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelican, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi. Banyak upaya yang dilakukan untuk memberantas praktik korupsi, akan tetapi praktik korupsi tetap berlanjut dengan modus operasi yang semakin canggih dan terorganisir, yang menyulitkan upaya penanggulangan nya.

Menurut *Transparency International* Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2019 adalah 40 dan tahun 2020 sebesar 37. Asumsinya, semakin besar angka IPK, maka negara tersebut dipersepsikan makin bersih dari korupsi. Sebaliknya, semakin kecil angka ipk suatu negara, maka menunjukkan semakin terjerambab-nya suatu negara dalam kubangan korupsi (Transparency International, 2020), menurunnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menurut terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah akan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik terhadap praktek korupsi yang terjadi, revisi UU KPK pada tahun 2019 yang melemahkan independensi KPK dinilai sebagai langkah mundur dalam upaya dalam upaya memperkuat integritas dan transparansi, hal ini dapat memberikan celah terhadap praktek korupsi. Pemerintah hanya mementingkan sebagian pihak, seperti kepentingan elit dalam kerangka investasi ekonomi. Padahal pada saat yang sama, legislasi

dapat menjadi aspek penting bagi penguatan pemberantasan korupsi, mulai dari revisi UU tindak pidana korupsi, dan rancangan UU perampasan aset. Namun, berbagai regulasi penting itu justru menggantung tanpa pembahasan (Indonesia Corruption Watch, 2021).

GAMBAR 1. KORUPSI DI INDONESIA TAHUN 2019-2023



Sumber: Indonesia Corruption Watch

Berdasarkan pada gambar 1 memperlihatkan kasus korupsi di Indonesia tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, pada tabel tersebut terlihat bahwa jumlah kasus dan jumlah tersangka meningkat secara terus-menerus dari tahun 2019 sampai 2023, peningkatan praktek korupsi menurut (Indonesia Corruption Watch, 2021) karena adanya ketimpangan dalam penegakan hukum, dimana aparat penegak hukum cenderung lebih responsif terhadap laporan dari pejabat dibandingkan dengan masyarakat, dan juga karena belum maksimalnya instrumen pemerintah seperti Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) dalam menekan angka korupsi.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas praktek korupsi seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), reformasi

birokrasi dan lain-lain (Indonesia Corruption Watch, 2024), akan tetapi berdasarkan gambar 1 dapat dilihat terjadi peningkatan secara terus-menerus dari jumlah kasus dan jumlah tersangka korupsi, maraknya kejahatan korupsi yang terjadi membutuhkan upaya yang luar biasa guna mencegah dan memberantasnya.

Mengurangi tindakan korupsi merupakan proses yang panjang, yang memerlukan upaya terus menerus dari pemerintah dan masyarakat. Negara yang tidak stabil cenderung mengalami perubahan rezim yang sering. Rezim tersebut cenderung menyalahgunakan politik yang relatif singkat untuk kekuasaan mereka dalam mendapatkan keuntungan pribadi mereka melalui korupsi (Churchill et al., 2013).

Demokrasi adalah salah satu bentuk pengawasan rakyat terhadap pemerintahan, salah satu penyebab korupsi terbesar adalah pemerintahan yang otoriter, pemerintahan otoriter merasa berkuasa dan tidak ada pengawasan sehingga menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau keluarganya dan inilah hal utama dari korupsi. Demokrasi menuntut adanya kedaulatan rakyat, setiap orang memiliki hak untuk menyuarakan kepentingannya dan kontrol terhadap pemerintah, dengan kata lain demokrasi menuntut adanya transparansi dan partisipasi masyarakat mengenai apa yang dilakukan oleh pemerintah (Djayadi, 2013).

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mampu meminimalkan praktek korupsi karena demokrasi memiliki prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik. Namun, dalam kenyataannya demokrasi tidak secara

otomatis menjamin terbebasnya suatu negara dari praktek korupsi. Banyak negara demokratis yang justru memiliki tingkat demokrasi yang tinggi karena demokrasi yang dijalankan masih bersifat struktural tanpa substansi. Demokrasi yang bebas dari korupsi terwujud apabila prinsip-prinsip demokrasi dijalankan secara konsisten dan substansial. Menurut (Transparency International, 2020) intensitas kejahatan korupsi di suatu negara mencerminkan kualitas demokratisasi di suatu negara, apabila demokrasi di suatu negara berkembang ke arah semakin sempurna, maka negara tersebut relative bersih dari korupsi.

Selain itu, peningkatan pembangunan manusia dan pada suatu negara tidak dapat dipisahkan dengan upaya pemberantasan korupsi negara tersebut (Retnowati & Utami, 2014). Negara bertanggung jawab dalam meningkatkan taraf hidup, pendidikan dan kesejahteraan warga negaranya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, akan lebih dapat meningkatkan proses pengawasan penyelenggaraan pemerintahan secara umum oleh masyarakat. Tingkat pendidikan yang tinggi akan dapat meningkatkan sikap kritis terhadap perilaku menyimpang aparatur pemerintah. Tingkat kesejahteraan masyarakat umum yang tinggi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya mengurangi dorongan untuk melakukan perbuatan menyimpang seperti halnya korupsi (Rajasa, 2014).

Sistem penyelenggaraan negara yang terbebas dari korupsi ditandai dengan tercapainya pemerintahan yang baik (KNKG, 2010). Pemerintahan yang baik ditandai dengan politik yang stabil (Nations, 2000). Stabilitas politik menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemerintahan. Dalam situasi

politik yang stabil pemerintah dapat berfungsi secara efektif tanpa gangguan atau konflik yang dapat mengganggu proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat merumuskan dan mengesahkan undang-undang yang lebih ketat terhadap praktek korupsi, pemerintah dapat fokus pada pengembangan kebijakan yang dirancang untuk memperkuat kerangka hukum, menegakkan sanksi yang lebih berat, dan meningkatkan sistem peradilan untuk melawan praktek korupsi (TÜREDİ & Altiner, 2016). (Gary S. Becker, 1968) menjelaskan bahwa kemungkinan atau probabilitas seseorang untuk ditangkap dan beratnya hukuman yang dijatuhkan mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan korupsi.

Kurangnya pemahaman yang komprehensif terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk menekan tingkat korupsi, seperti pembentukan UU khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun upaya tersebut belum sepenuhnya efektif, dilihat dari jumlah korupsi yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini terjadi karena belum dipahaminya secara menyeluruh faktor-faktor yang mendasari terjadinya korupsi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pengaruh demokrasi, Indeks pembangunan manusia, tata kelola pemerintahan terhadap korupsi di Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi di Indonesia”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, masalah yang akan diteliti selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana hubungan demokrasi dengan korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana hubungan indeks pembangunan manusia dengan korupsi di Indonesia?
3. Bagaimana hubungan tata kelola pemerintahan dengan korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Untuk mengetahui hubungan demokrasi dengan korupsi di Indonesia?
2. Untuk mengetahui hubungan indeks pembangunan manusia dengan korupsi di Indonesia?
3. Untuk mengetahui hubungan tata kelola pemerintahan dengan korupsi di Indonesia?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat memberikan masukan serta informasi yang berguna bagi berbagai belah pihak, diantaranya:

1. Bagi penulis, tulisan ini sebagai salah satu untuk memenuhi gelar Sarjana Ekonomi (S1) pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang serta untuk menambah wawasan penulis dalam pembuatan karya ilmiah.

2. Bagi masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah informasi.
3. Bagi mahasiswa diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau bahan pembanding untuk penelitian sejenis

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap hasil dari penelitian antara variabel bebas dan variabel terikat, seperti yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis korelasi di Indonesia antara demokrasi dengan korupsi adalah dengan nilai korelasi (0,631) dan nilai signifikansi sebesar (0,011) yang artinya korelasi antara variabel demokrasi dengan korupsi adalah positif dan signifikan dengan tingkat keeratan hubungan kategori kuat. Ini memberikan pengertian bahwa variabel demokrasi memiliki hubungan yang kuat terhadap korupsi di Indonesia.
2. Dari hasil analisis korelasi di Indonesia antara indeks pembangunan manusia dengan korupsi adalah dengan nilai korelasi (0,521) dan nilai signifikansi sebesar (0,046) yang artinya korelasi antara variabel indeks pembangunan manusia dengan korupsi adalah positif dan signifikan dengan tingkat keeratan hubungan kategori cukup. Ini memberikan pengertian bahwa variabel d indeks pembangunan manusia memiliki hubungan yang cukup terhadap korupsi di Indonesia.
3. Dari hasil analisis korelasi di Indonesia antara tata kelola pemerintahan dengan korupsi adalah dengan nilai korelasi (0,713) dan nilai signifikansi sebesar (0,002) yang artinya korelasi antara variabel indeks pembangunan manusia dengan korupsi adalah positif dan signifikan dengan tingkat keeratan hubungan kategori kuat. Ini memberikan pengertian bahwa

variabel tata kelola pemerintahan memiliki hubungan yang kuat terhadap korupsi di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan hasil pembahasan mengenai pengaruh demokrasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tata kelola pemerintahan di Indonesia yang telah dijabarkan, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya variabel bebas yang signifikan terhadap korupsi di Indonesia. Maka hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi otoritas pembuat kebijakan dalam menetapkan kebijakan guna memberantas atau mengurangi praktek korupsi yang terjadi di Indonesia. Disarankan kepada pemerintah Indonesia agar tetap meningkatkan tata kelola pemerintahan. Pemerintah perlu memastikan stabilitas politik di Indonesia, dimana stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi penegakan hukum dan penegakan hukum merupakan prasyarat untuk mengendalikan korupsi. Pemerintahan yang stabil memungkinkan berlangsungnya reformasi kelembagaan secara berkelanjutan, penegakan hukum yang konsisten dan koordinasi yang efektif yang dapat mengurangi ataupun memberantas praktek korupsi.
2. Disarankan kepada pemerintah Indonesia agar tetap meningkatkan demokrasi, karena intensitas kejahatan korupsi suatu negara mencerminkan kualitas demokratisasi di suatu negara. Bila demokrasi di suatu negara

berkembang ke arah semakin sempurna, maka hampir dipastikan bahwa negara tersebut relatif bersih dari korupsi.

3. Pemerintah dan pemangku kebijakan disarankan untuk terus meningkatkan indeks pembangunan manusia, terutama di aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, karena peningkatan IPM berkontribusi pada pengurangan tingkat korupsi. Selain itu peningkatan IPM dapat membuat Masyarakat turut aktif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan tata kelola pemerintahan guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas demi menekan praktek korupsi.
4. Bagi Penulis selanjutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan faktor-faktor yang menjadi faktor utama dalam mempengaruhi korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akçay, S. (2006). Corruption and human development. *Cato Journal*, 26(1), 29–48.
- Ali, A. M., & Isse, H. S. (2003). Determinants of Economic Corruption : A Cross-Country Comparisson. *International Journal of Business and Social Science*, 07(3), 160–169.
- Amundsen, I. (1999). Political Corruption: An Introduction to the Issues. In *The Encyclopedia of Research Methods in Criminology and Criminal Justice: Volume II: Parts 5-8*. <https://doi.org/10.1002/9781119111931.ch154>
- Becherair, A., & Tahtane, M. (2017). *THE CAUSALITY BETWEEN CORRUPTION AND HUMAN DEVELOPMENT IN MENA COUNTRIES : A PANEL DATA ANALYSIS*. XX(2), 63–84.
- BPS. (2016). *INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 2015*. 57, 1–8.
- BPS. (2021). *STATISTIK PENUNJANG PENDIDIKAN 2021*. In *Badan Pusat Statistik* (Vol. 44, Issue 8). Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2024a). *Indeks Pembangunan Manusia 2023*. 18, 1–282.
- BPS. (2024b). *Indeks Perilaku Anti Korupsi 2024*. 8.
- BPS RI. (2015). *Katalog Publikasi 2015*.
<https://www.bps.go.id/publication/2018/12/28/d15d77d47788e62899dfc980/katalog-publikasi-bps-2018.html>
- Chetwynd, E., Chetwynd, F., & Spector, B. (2003). Corruption and Poverty : A Review of Recent Literature. *Arkhib Anatomii, Gistologii i Embriologii*, 73(12), 39–44.
- Churchill, R. Q., Agbodohu, W., & Arhenful, P. (2013). Determining Factors affecting corruption: A cross-country analysis. *International Journal of Economics, Business and Finance*, 1(10), 275–285.
<https://doi.org/10.5958/2277-937x.2020.00013.1>
- Crouch, H. (1982). *Perkembangan Politik dan Modernisasi*. Yayasan Perkhidmatan.
- Daven, M. (2016). Korupsi Dan Demokrasi. *Jurnal Ledalero*, 15(1), 46.
<https://doi.org/10.31385/jl.v15i1.28.46-73>
- David, W., & Djarmis, A. R. A. (2018). Metode Statistik Untuk Ilmu dan Teknologi Pangan. In *Universitas Bakrie*.
- Djayadi, H. (2013). *Korupsi dalam Demokrasi*.
- Dwi Sulisworo, T., Wahyuningsih, D., & Arif, B. (2012). *DEMOKRASI*.
- Fackler, T., & Lin, T. (1995). Political corruption and presidential elections, 1929-1992. *The Journal of Politics*, 57(4), 971–993.
<https://doi.org/10.2307/2960398>
- Farooq, A., Shahbaz, M., Arouri, M., & Teulon, F. (2013). Does corruption impede economic growth in Pakistan? *Economic Modelling*, 35, 622–633.
<https://doi.org/10.1016/j.econmod.2013.08.019>
- Fisman, R., & Gatti, R. (2002). Decentralization and corruption: evidence across countries. *Journal of Public Economics*, 83(3), 325–345.
<https://doi.org/10.3810/pgm.2001.03.1772>
- Gary S. Becker. (1968). *Crime and Punishment: An Economic Approach*.

- University of Chicago and National Bureau of Economic Research* 1., 92(3), 472–475. [https://doi.org/10.1016/S0002-9610\(56\)80126-8](https://doi.org/10.1016/S0002-9610(56)80126-8)
- Gupta, S., Davoodi, H., & Alonso-Terme, R. (1998). *Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty? Prepared.*
- Gurrib, I. (2015). The relationship between the inequality-adjusted human development index and the corruption perceptions index in Gulf Cooperation Council (GCC) major economies. *The Political Economy of Wasta: Use and Abuse of Social Capital Networking, January 2015*, 47–61. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-22201-4>
- Hariyani, H. F., Dominicus, S. P., & Asmara, A. (2016). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KORUPSI DI KAWASAN ASIA PASIFIK (Analysis of Factors That Affecting Corruption in Asia-Pacific Region). *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 5(2), 32–44.
- ICW. (2023). *Memburuknya IPK Indonesia 2022: Gagal Total Pemberantasan Korupsi Jokowi* (Vol. 9).
- Indonesia Corruption Watch. (2021). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok: Politik Hukum Kian Memperlemah Agenda Pemberantasan Korupsi.*
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan evaluasi kinerja komisi pemberantasan korupsi periode 2019 - 2024 1.*
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The World Wide Governance Indocator: Methodology and Analytical Issues. In *Policy Research Working Paper* (Vol. 3, Issue 2). www.govindicators.org
- Kerry L. Hofheimer. (2006). *The Good Governance Agenda of International Development Institutions.* 1–368. <https://doi.org/10.25777/67he-3892>
- Klitgaard, R. (1988). Controlling Corruption. In *University of California.* University of California Press. <http://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1pnj3b.3>
- KNKG. (2010). *Pedoman Umum Goo Corporate Governance Indonesia.* Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
- Kotera, G., Okada, K., & Samreth, S. (2012). Government size , democracy , and corruption : An empirical investigation. *Economic Modelling*, 29(6), 2340–2348. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.06.022>
- Margolis, J. E. (2010). Understanding political stability and instability. *Civil Wars*, 12(3), 326–345. <https://doi.org/10.1080/13698249.2010.509568>
- Mauro, P. (1995). CORRUPTION AND GROWTH. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681–712.
- Morris, S. D. (2006). Corruption in Latin America. *The Latin Americanist*, 49(2), 5–16. <https://doi.org/10.1353/tla.2006.0051>
- Nations, U. (2000). What is Good Governance. *Economic and Social Commission for Asia Anf the Pasific*, 69–70. <https://doi.org/10.18356/d4072237-en-fr>
- Nawatmi, S. (2014). Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Asia Pasifik. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 21(1), 73–82.
- Prasetyo, T. J., & Marselina, M. (2022). ADAKAH PERBEDAAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGENDALIAN KORUPSI ANTARA NEGARA MAJU, MENENGAH DAN MISKIN? *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(3), 191–197.

- Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2018). PENGARUH TATA KELOLA DAN E-GOVERNMENT TERHADAP KORUPSI. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(4), 431–450.
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>
- Rajasa, A. (2014). ANALISIS HUBUNGAN TINGKAT PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT PERSEPSI KORUPSI PADA NEGARA-NEGARA ANGGOTA APEC. 11(1), 77–87.
- Retnowati, Y., & Utami, Y. S. (2014). Relevansi Gerakan Anti Korupsi untuk Pembangunan. *Relevansi Gerakan Anti Korupsi Untuk Pembangunan*, 18(01), 28–38.
- Rose-Ackerman, S. (1999a). Corruption and government: Causes, consequences, and reform. In *Journal of Policy Analysis and Management* (Vol. 19, Issue 3). THE PRESS SYNDICATE OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE.
[https://doi.org/10.1002/1520-6688\(200022\)19:3<488::aid-pam10>3.0.co;2-o](https://doi.org/10.1002/1520-6688(200022)19:3<488::aid-pam10>3.0.co;2-o)
- Rose-Ackerman, S. (1999b). Political Corruption and Democracy. *Journal of International Law*, 14, 363–378.
- Sandholtz, W., & Koetzle, W. (2000). Accounting for corruption: Economic structure, democracy, and trade. *International Studies Quarterly*, 44(1), 31–50. <https://doi.org/10.1111/0020-8833.00147>
- Sanit, A. (2015). *Sistem Politik Indonesia : Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan* (18th ed.). Raja Grafindo Persada.
- Transparency International. (2015). Understanding Corruption. In *Transparency International*.
- Transparency International. (2020). *Corruption Perceptions Index 2020*.
- TÜREDİ, S., & Altiner, A. (2016). ECONOMIC AND POLITICAL FACTORS AFFECTING CORRUPTION IN DEVELOPING COUNTRIES. *Faculty of Economics and Administrative Sciences*, 7(1), 23–38.
<https://doi.org/10.2307/j.ctt1tm7gt4.8>
- UNDP. (1990). *DEVELOPMENT REPORT 1990*.
- UNDP. (1993). *HUMAN DEVELOPMENT REPORT 1993*.
- UNDP. (2008). *Human Development Report 2007 / 2008 Fighting climate change : Human solidarity in a divided world*.
- Wartiningih, W. (2021). APAKAH TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN STRUKTUR POLITIK MAMPU MENEKAN KECENDERUNGAN TERJADINYA KORUPSI DI INDONESIA? *JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN*, 4(2), 88–106.
<https://doi.org/10.14710/jdep.4.2.88-106>
- World Bank. (1997). *Helping Countries Combat Corruption*. 24687.

